

**RESOLUSI KONFLIK BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI DESA RATO KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA**

***COMMUNITY EMPOWERMENT BASED CONFLICT RESOLUTION IN RATO
VILLAGE, LAMBU DISTRICT, BIMA DISTRICT***

¹Taufik Irfadat, ²Haeril
taufikirfadat@gmail.com

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Mbojo-Bima, Indonesia

ABSTRACT

Conflict between the state and society can be seen as a form and a real picture of local political dynamics. Various accurate moves must be issued to reduce the number of conflicts, one of which is empowerment in the form of sports activities. Potential Conflict in the village of Rato, Lambu sub-district is very potential, which always leads to destructive conflicts resulting in material losses and casualties. Conflicts often occur in the village of Rato, Lambu sub-district, with diverse community characteristics making them vulnerable to conflict, one of which is thuggery, agrarian cases and motorbike theft, which have the potential for conflict. The purpose of this research is to collect information from various sources and then analyze the substance of the causes of conflict and empowerment strategies. The results of the research are in the form of principles and essential commitments to make the Rato village government and village institutions more enthusiastic in holding activities as a means of diversifying attention and reducing the level of conflict. The heightened conflict has made the Rato village government route these activities by arguing that it reduces conflict and the village institutions work hard. Keyword : conflict; empowerment; society

ABSTRAK

Konflik negara dan masyarakat dapat dilihat sebagai salah satu bentuk dan gambaran nyata dari dinamika politik lokal. Berbagai jurus yang jitu harus dikeluarkan untuk menekan angka konflik yang salah satunya dengan pemberdayaan dalam bentuk kegiatan olah raga. Potensi Konflik di Desa Rato Kecamatan Lambu sangat potensial yang selalu mengarah kepada konflik yang destruktif hingga mengakibatkan kerugian materil dan menelan korban jiwa. Konflik sering terjadi di Desa Rato Kecamatan Lambu dengan karakteristik masyarakat yang beragam menjadikannya rentan terhadap konflik salah satunya tindakan premanisme, kasus agraria dan pencurian motor sangat potensial terjadinya konflik. Adapun tujuan dari penelitian ini dengan mengumpulkan informasi berbagai sumber kemudian dianalisis substansi penyebab konflik dan strategi pemberdayaan. Hasil penelitian berupa Prinsip dan komitmen yang

esensial menjadikan Pemerintah Desa Rato dan Lembaga-Lembaga Desa semakin spirit dalam mengadakan kegiatan sebagai sarana pengalihan atensi dan tingkat konflik dapat dikurangi. Konflik yang semakin tinggi menjadikan Pemerintah Desa Rato merutinkan kegiatan tersebut dengan dalil mengurangi konflik dan lembaga-lembaga desa bekerja keras

Kata kunci : konflik; pemberdayaan; masyarakat

PENDAHULUAN

Konflik negara dan masyarakat dapat dilihat sebagai salah satu bentuk dan gambaran nyata dari dinamika politik lokal. Bentuk konflik negara dan masyarakat yang lazim terjadi biasanya berhubungan dengan proses pembuatan, perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan terutama dalam konteks kebijakan publik maupun pengisian jabatan publik di daerah, seperti menempatkan golongan, keluarga dan teman oleh pemegang kekuasaan eksekutif. Tetapi tidak jarang konflik negara dan masyarakat dipicu oleh persoalan pribadi dan persaingan politik antar elit. Sehingga berakibat pada terabaikannya tugas-tugas pokok pemerintahan sebagai pelayan publik.

Ismawan (Isbandi Rukminto Adi, 2002: 162-163), mengemukakan lima strategi pengembangan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu; (1) program pengembangan sumber daya manusia, (2) program pengembangan kelembagaan lokal, (3) program pemupukan modal swasta, (4) program pengembangan usaha produktif, dan (5) program penyediaan informasi tepat guna. Sikap saling menghargai yang semestinya dijunjung tinggi menjadi langka dalam era modern yang memaksa sebagian orang menjadi predator dan gladiator untuk mendefensifkan eksistensinya pada kehidupan yang semakin keras (hard). Konflik horizontal dan vertikal menjadi ihwal yang sering terjadi sepanjang tahun diberbagai daerah di indonesia, tidak hanya kerugian materil tetapi manusia menjadi korban dari konflik yang seakan menjadi kulturisasi. Konflik horizontal sering terjadi di indonesia sebagai konsekuensi

ketidakcakapan seseorang dalam memahami perbedaan karakter dan perbedaan lainnya termasuk sikap amoral yang terkadang menjadi embrio dalam memantik konflik, tidak jauh berbeda dengan dengan konflik vertikal yang sering terjadi sebagai konsekuensi dari ketidakpuasan masyarakat atas kinerja pemerintah yang selalu menyajikan kebijakankebijakan yang tidak populis dan bertransformasi menjadi pemerintahan yang neoliberalisme.

Di teritorial Nusa Tenggara Barat konflik horizontal yang selalu bermuara pada destruktif menjadi hal yang sering terjadi sepanjang tahun, hal itu tidak dapat dihindari mengingat kompleksitas karakteristik seseorang sehingga konflik horizontal destruktif menjadi potret sebagai konfigurasi bahwa terdapat *problem* serta patologi yang sedang menghinggapi *mindset* dan tindakan yang amoral dari masyarakat. Konflik tidak dapat disegmentasi dari karakter masyarakat yang beragam, keragaman karakter sangat mudah memicu konflik horizontal dampak dari perbedaan pemahaman, sikap amoral, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, dan lain sebagainya. Ihtwal inilah yang sering terjadi di berbagai wilayah indonesia, berbagai jurus yang jitu dikeluarkan untuk menekan angka konflik salah satunya dengan pemberdayaan dalam bentuk kegiatan olah raga.

Potensi Konflik di Desa Rato Kecamatan Lambu sangat potensial yang selalu mengarah kepada konflik yang destruktif hingga mengakibatkan kerugian materil dan menelan korban jiwa. Konflik sering terjadi di Desa Rato Kecamatan Lambu dengan karakteristik masyarakat yang beragam menjadikannya rentan terhadap konflik salah satunya tindakan premanisme, kasus agraria dan pencurian motor sangat potensial terjadinya konflik. Tindakan kekerasan seakan menjadi neoidentitas yang melekat pada masyarakat modern. Apabila Pelaku pencurian motor ditangkap oleh masyarakat maka potensi amukan massa sangat potensial dan rata-rata akan meninggal dunia bahkan rumah pelaku menjadi sasaran dirusak oleh massa, hal yang sama apabila seseorang

diduga dukun santet maka sangat potensial rumah menjadi sasaran dan akan diusir dari desa tersebut. Berbeda dengan konflik agraria masing-masing kubu akan melengkapi diri dengan senjata tajam, bahkan sangat potensial terjadinya duel antara kubu untuk mempertahankan lahan yang menjadi perebutan sewalaupun sudah secara yuridiksi bahwa lahan tersebut menjadi hak dari kubu yang melawan. Konflik lainnya tidak berbeda jauh dari konflik yang telah terjadi dan sangat potensial terjadinya tindakan yang destruktif yang sebenarnya tidak mencerminkan identitas masyarakat kecamatan lambu yang menjunjung tinggi falsafah “maja labo dahu”.

Kegiatan pemberdayaan gencar dilakukan oleh pemerintah desa dan kecamatan dengan mengalokasikan sebagian dana desa untuk kegiatan pemberdayaan pemuda dan olah raga, dengan tujuan untuk mendorong adanya kegiatan dan aktivitas yang akan dilakukan oleh masyarakat. Salah satunya dengan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan peralatan bengkel motor, pembudidayaan ikan air tawar, pembudidayaan bebek, pembudidayaan kambing, kegiatan olah raga, dan kegiatan lainnya yang berkonten positif. Pemberdayaan tersebut telah menunjukkan bahwa konflik destruktif mulai berkurang dengan asumsi bahwa pemuda dan masyarakat memerlukan kegiatan dan aktivitas yang mendukung, terlebih pemuda yang tidak memiliki pekerjaan. Manajemen konflik yang efektif dapat mencapai tingkat konflik yang optimal yaitu, menumbuhkan kreativitas anggota, menciptakan inovasi, mendorong perubahan, dan bersikap kritis terhadap perkembangan lingkungan. Susan (2009) mengatakan bahwa dalam kamus besar bahasa indonesia yang disusun oleh poerwadarminta, konflik berarti pertentangan atau pececokan fisik antara dua belah pihak berseberangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam pendekatan ini peneliti akan meneliti individu atau unit sosial tertentu secara lebih mendalam dengan berusaha untuk menemukan semua variabel penting yang terkait dengan diri subyek yang diteliti. Subyek penelitian ini dipilih melalui teknik *nonprobability sampling*, dengan menggunakan teknik *purposive sampling* atau teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan aspek tertentu. Teknik pengumpulan data terdiri atas observasi (*observation*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi (*documentation*).

HASIL DAN DISKUSI

Peran Pemerintah Desa Melalui Kegiatan Sosial Dalam Mengurangi Konflik

Peranan tersebut menjadikan konflik destruktif dapat dimitigasi dengan dini dalam menjaga dan menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan sehingga dapat menghindari jatuhnya korban jiwa dan kerugian materi. Peranan pemerintah berupa memfasilitasi kedua kelompok atau pihak untuk menyelesaikan permasalahan dengan mendengarkan pengkuan dari kedua belah pihak. Sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 huruf G tentang Desa yaitu membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa. Peran dari Pemerintah Desa Rato dengan adanya Aktivitas dan kegiatan tersebut direspon dengan baik oleh masyarakat dengan berpartisipasi sebagai peserta dan implementor, salah satunya kegiatan MTQ banyak masyarakat yang ikut sebagai peserta dan sebagiannya terlibat sebagai penyelenggara. Hal tersebut menjadi inheren dengan peran pemerintah sebagai katalisator dalam mengurangi konflik yang terjadi di desa rato. Menurut narwoko (2004:160) fungsi peranan adalah memberi arah pada proses sosialisasi, pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan menghidupkan system pengendali dan control sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat, maupun dapat

mempersatukan kelompok atau masyarakat. Konflik yang semakin tinggi menjadikan Pemerintah Desa Rato merutinkan kegiatan melibatkan masyarakat dengan dalil mengurangi konflik apalagi dengan tren konflik yang semakin meroket menjadikan Pemerintah Desa Rato dan lembaga-lembaga desa bekerja keras. Prinsip dan komitmen yang esensial menjadikan Pemerintah Desa Rato dan lembaga-lembaga desa semakin spirit dalam mengadakan kegiatan sebagai sarana pengalihan atensi dan tingkat konflik dapat dikurangi. Keresahan yang dirasakan oleh masyarakat menjadi atensi yang serius bagi pemerintah desa dan lembaga-lembaga desa karena dapat memicu terjadinya konflik yang berkepanjangan dan dapat mempengaruhi psikologis masyarakat dan regenerasi.

Tabel 1. Rencana Kegiatan Gotong Royong Tahun 2019

No	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat/Lokasi
1	Gotong royong drainase	Setiap minggu	RT/RW Masing-masing
2	Pembersihan TPu	4x setahun	TPu desa rato
3	jum'at bersih	Setiap hari jum'at	Masjid besar ar-rahman dan masjid nurul hidayah
4	bulan bersih	Setiap awal bulan	Dusun masing-masing
5	Hijaukan rato	3x setahun	Jalan raya dan halaman masjid/mushalla
6	Pemasangan portal	Disesuaikan kondisi portal	RT/RW Masing-masing
7	musabawah tilawatil qur'an (MTQ)	1x setahun	Masjid besar ar-rahman
8	Lomba kebersihan	3x setahun	RT/RW Masing-masing
9	Lomba dalam Merayakan HuT RI	1x setahun	RT/RW Masing-masing
10	Siskamling	Setiap hari	RT/RW Masing-masing

sumber : kantor Desa Rato Kecamatan Lambu kab. Bima tahun 2019

Mengurangi Potensi Konflik Dengan Program Pemberdayaan

Upaya mengurangi konflik merupakan langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Rato dengan lembaga-lembaga desa melalui beragam kegiatan

dan aktivitas sebagai katalisator untuk mengurai dan mereduksi potensi-potensi konflik, namun upaya tersebut masih dirasakan kurang potensial bagi perkembangan kondisi social dan ekonomi saat ini. Kurangnya ruang untuk mendapatkan pekerjaan mengakibatkan Pengangguran merajalela hal inilah yang dirasakan oleh sebagian masyarakat atau pemuda menjadikan mereka sulit untuk berekspresi dan memanfaatkan keilmuan atau pengetahuan yang dimiliki. Potensi konflik dapat terjadi manakala seseorang tidak mampu menanggulangi amarahnya yang mencapai titik klimaks dengan mengekspresikan dengan tindakan yang mengarah destruktif dan konstruktif.

Dalam rangka menciptakan pemberdayaan masyarakat desa secara konkret di dalam UU Nomor 26 tahun 2014 pasal 6 huruf H tentang Desa yaitu membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. Dengan perkembangan konflik yang terjadi maka harus dilakukan pemberdayaan, pemerintah desa memberikan ruang yang besa bagi masyarakat dan pemuda untuk berdaya dengan memberikan bantuan sebesar Rp. 10.000.000,- modal ini diberikan kepada 3 (tiga) dusun antara lain dusun rato nae, dusun sigi, dan dusun rato baru modal ini akan dijadikan sebagai stimulus awal sebagai pemberdayaan. Modal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai dana stimulant sehingga masyarakat atau pemuda di dusun tersebut dapat mengelola dengan baik, mengingat pemberdayaan tersebut merupakan atensi pemerintah desa sebagai uapaya untuk mengurasi potensi konflik. Modal pemberdayaan dari Pemerintah Desa Rato cukup besar dengan tujuan untuk dapat membeli bibit bebek dan kebutuhan pakan serta vitamin lainnya untuk perawatan, pemerintah desa dan lembaga desa harus mengawasi program pemberdayaan ini yang merupakan bentuk atensi pemerintah desa agar dapat mengurangi potensi konflik dan masyarakat dapat memanfaatkannya sebagai sarana untuk menstimulasi ekonomi dengan cara menciptakan usahawan. Tidak

hanya itu modal yang telah diberikan dapat dimanfaatkan dengan membeli peralatan perbengkelan dengan pertimbangan banyak pemuda yang memahami otomotif. Menurut Eddy Papilaya yang dikutip oleh Zubaedi (2007), bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.

Tabel 2. Jenis Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2019

No	Jenis kegiatan	Jenis bantuan	sumber anggaran	Lokasi pemberdayaan	penerima	Ket.
1	Ternak bebek	Modal Rp. 10.000.000	APBDes tahun 2019	Dusun rato nae	Komunitas pemuda rato nae	Dikelola oleh Komunitas pemuda rato nae
2	Perbengkelan	Modal Rp. 10.000.000	APBDes tahun 2019	Dusun Rato Baru	Ikatan pemuda dan pelajar	Dikelola oleh Ikatan pemuda dan pelajar
3	Ternak kambing	Modal Rp. 10.000.000	APBDes tahun 2019	Dusun Sigi	Pemuda	Dikelola oleh pemuda
4	Amplifier	12 unit	APBDes tahun 2019	RT 01 s/d RT 12	Ketua RT	untuk hajatan
5	Wajan, dandang, dan kompor gas.	24 paket	APBDes tahun 2019	RT 01 s/d RT 12	Ketua RT	untuk hajatan

Sumber : kantor Desa Rato Kecamatan Lambu kab. Bima tahun 2019

Menciptakan Stabilitas Sosial dengan Siskamling

Sistem keamanan lingkungan yang ada di desa rato telah diaktifkan kembali oleh Pemerintah Desa Rato dengan menyediakan sarana dan prasarana

tujuannya yaitu dapat dimanfaatkan untuk menciptakan stabilitas social pasca konflik, siskamling tersebut dapat beroperasi 12 jam setelah itu saling bergantian untuk berjaga dengan biaya yang dibebankan kepada APBDes tahun anggaran sesuai dengan pelaksanaannya siskamling yaitu tahun 2019. Grigg (2000) bahwa infrastruktur merupakan system fisik yang meyediakan transportasi, jalan, pengairan atau irigasi, bangunan gedung dan fasilitas public lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan social maupun kebutuhan ekonomi. Perangkat siskamling tersebut telah sediakan oleh Pemerintah Desa Rato berupa pos jaga, palang pintu, papan informasi, konsumsi dan sebagiannya sukarela dari masyarakat yang terlibat sebagai anggota siskamling yang menjaga selama 12 jam setiap hari, tujuan adanya siskamling tidak hanya untuk menjaga kompleks dari maling atau pencuri melainkan dapat mencegah secara dini apabila ditemukan seseorang atau kelompok yang akan bertikai atau saling menyerang.

Sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 huruf G tentang Desa yaitu membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa. Untuk menunjang kegiatan siskamling Pemerintah Desa Rato menganggarkan melalui APBDes dengan tujuan dapat mereduksi potensi konflik dan mencegah apabila terjadi pencurian. Sebagian perangkat ronda disediakan oleh desa berupa Pos jaga, jadwal ronda, portal pintu. Upaya mereduksi konflik merupakan bagian yang sangat penting karena hal sekecil saja dapat menstimulasi konflik, maka dari itu untuk mengurangi residu yang ada perlu dilakukan pencegahan dini atau mitigasi. Sangat diperlukan untuk mengawasi kegiatan siskamling dan perangkat ronda yang telah disediakan yang merupakan bagian yang diperlukan untuk memberikan frekwensi manakala terjadinya konflik, sebagian perangkat disediakan secara sukarela oleh masyarakat berupa pentungan, dengan Kembali aktifnya siskamling merupakan aksi nyata dari Pemerintah Desa Rato dalam

mengurangi konflik, untuk mendukung adanya siskamling dan mencegah apabila terjadi konflik atau pertikaian maka pemerintah desa memfasilitasinya.

Tabel 3. Kegiatan Siskamling Tahun 2019

No	Jenis kegiatan	Pelaksana	Lokasi
1	Siskamling	Masyarakat	RT/RW masing-masing
2	Pemasangan portal	Masyarakat dan pemerintah desa	Desa rato
3	Pembangunan posko siskamling	Masyarakat dan pemerintah desa	Desa rato
4	Pentungan	Disediakan sukarela Masyarakat	RT/RW masing-masing

sumber : kantor Desa Rato Kecamatan Lambu kab. Bima tahun 2019

Mengkolaborasikan Seluruh Lembaga Desa

Menyelesaikan sebuah konflik tidak dapat dilakukan oleh pemerintah desa semata namun diperlukan *justice of collaboration* antar lembaga-lembaga desa yang ada di desa rato dengan dukungan dari masyarakat, pengkolaborasi antar lembaga merupakan bentuk koordinasi yang siap untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 26 ayat 4 huruf d yaitu menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, kemudian huruf g yaitu menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa, dan huruf k yaitu menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa. Penyelesaian sebuah masalah dilakukan dengan mengundang kelompok yang bertikai dengan difasilitasi oleh pemerintah desa dibantu oleh lembaga desa yang telah menyepakati untuk menyelesaikan sebuah masalah, dengan membagi tugas antara lembaga desa dan pemerintah desa sehingga deskripsi tugas ada yang menghubungi kelompok yang bertikai ada pula yang meningkatkan keamanan apabila penyelesaian tidak dapat dilakukan dan *frekwensi* potensi konflik dapat diketahui. Kolaborasi lembaga desa tersebut

sangat ideal karena untuk menyelesaikan masalah perlu dilakukan identifikasi masalah dan mengkategorisasi tingkat masalah sehingga apabila telah diketahui maka pemerintah desa dan lembaga desa dapat menyelesaikannya dengan catatan tidak perlu ada lagi konflik. Langkah Pemerintah Desa dan seluruh Lembaga Desa untuk berkolaborasi menyelesaikan konflik merupakan persatuan lembaga dan pemerintah sebagai representasi yang konkrit untuk menjaga stabilitas social. Lembaga desa dan pemerintah desa menjalin Kolaborasi yang sudah dilakukan beberapa bulan yang lalu dan ada beberapa masalah telah selesai dikantor desa bersama lembaga desa.

Table 4. insiden konflik yang telah diselesaikan sepanjang tahun 2019

No	Jenis konflik	Waktu	Kolaborator Lembaga
1	Tawuran remaja/anak sekolah	Selasa, 3 maret 2019	Pemerintah desa, lembaga desa, dan pihak sekolah
2	Perkara tanah warisan	Kamis, 12 april 2019	pemerintah desa dan lembaga desa
3	Pencurian motor	Kamis, 7 mei 2019	Polsek lambu, pemerintah desa dan lembaga desa.
4.	penganiayaan	Senin, 23 mei 2019	pemerintah desa dan lembaga desa
5	Tawuran remaja antara desa	Rabu, 9 juli 2019	pemerintah desa dan lembaga desa
6	Pembubaran paksa pesta miras	Minggu, 29 agustus 2019	pemerintah desa dan lembaga desa
7	Perkara batasubatas tanas	Minggu, 17 november 2019	pemerintah desa dan lembaga desa
8	Hewan ternak yang dilepas liar dan memakan tanaman bawang merah	Selasa, 5 desember 2019	pemerintah desa dan lembaga desa

sumber : kantor Desa Rato Kecamatan Lambu kab. Bima tahun 2019

Pemberdayaan Berupa Pengadaan Peralatan Otomotif Dan Ternak

Pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Rato dengan mengalokasikan APBDes tahun 2019 untuk diberikan sebanyak 3 (tiga) dusun yang ada dengan melibatkan lembaga desa sebagai pengawas kegiatan tersebut. Adapun pemberdayaan pada tahap pertama yaitu pengadaan peralatan otomotif yang dapat dimanfaatkan untuk membuka bengkel. Pada alokasi anggaran tahap kedua pemerintah desa juga memberikan bantuan berupa ternak yang dapat berkembang biak, konsiderasinya yaitu sumber makanannya melimpah karena dekat dengan persawahan. Pilihan tersebut merupakan permintaan dari masyarakat sendiri karena dinilai cukup potensial untuk dikembangkan karena dapat memenuhi permintaan pasar. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan dikantor desa dengan menghadirkan perwakilan dari 3 (tiga) dusun yang ada di desa rato, respon masyarakat sangat baik karena dapat memberikan ruang untuk berekspresi sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Sisi lain dari pemberdayaan tersebut ternyata dapat memberikan pekerjaan dan pendapatan bagi kelompok yang mengelola sehingga potensi konflik dapat direduksi dengan mengalihkan perhatian dengan memberikan pemberdayaan, dinamika dalam pemberdayaan tetap muncul dipermukaan namun tetap dapat dikendalikan dengan optimal karena disupervisi oleh lembaga desa.

Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Rato merupakan pemberdayaan pasca konflik, tujuannya dapat dikelola dengan baik oleh dusun atau kelompok penerima. Adapun yang diberikan yaitu bantuan peralatan otomotif dan hewan ternak. Bantuan yang diberikan harus diawasi, program pemberdayaan ini pemerintah desa harus memastikan bahwa bantuan sampai pada sasaran. Menurut Eddy Papilaya yang dikutip oleh Zubaedi (2007), bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang

dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.

Table 5. jenis bantuan pemberdayaan masyarakat tahun anggaran 2019

No	Jenis kegiatan/ pemberdayaan	Jenis bantuan	sumber angga-ran	Lokasi pember- dayaan	Penerima	Ket.
1	Ternak bebek	Modal Rp. 10.000.000	APBDes tahun 2019	Dusun rato nae	Komuni- tas pemuda rato nae	Dikelola oleh Komuni- tas pemuda rato nae
2	Perbeng-kelan	Modal Rp. 10.000.000	APBDes tahun 2019	dusun rato baru	Ikatan pemuda dan pelajar	Dikelola oleh Ikatan pemuda dan pelajar
3	Ternak kambing	Modal Rp. 10.000.000	APBDes tahun 2019	dusun sigi	Pemuda	Dikelola oleh pemuda
4	Amplifier	12 unit	APBDes tahun 2019	RT 01 s/d RT 12	Ketua RT	untuk hajatan
5	Wajan, dandang, dll.	24 paket	APBDes tahun 2019	RT 01 s/d RT 12	Ketua RT	untuk hajatan

Sumber : kantor Desa Rato Kecamatan Lambu kab. Bima tahun 2019

KESIMPULAN

Peran pemerintah dalam menyelesaikan eskalasi konflik merupakan cara yang baik untuk menyelesaikan konflik yang melibatkan masyarakat, peran pemerintah dengan cara mempertemukan kedua belah pihak dapat dijadikan sebagai monumental dalam mengedukasi agar dapat menghindari konflik; Program pemberdayaan yang diberikan merupakan strategi yang jitu sehingga masyarakat telah mengalihkan atensinya dengan mengelola fasilitas dan barang yang telah diberikan oleh pemerintah desa. Bahkan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga desa merupakan bentuk *supervise* agar bantuan dapat diterima oleh sasaran; Siskamling yang telah diaktifkan sangat ideal untuk memutus mata rantai potensi konflik selain itu juga dapat mencegah terjadinya pencurian,

adanya perangkat yang telah disediakan merupakan sarana yang dapat dioperasionalkan setiap saat untuk menstabilkan kondisi sosial; Kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Rato bersama dengan lembaga lembaga desa merupakan solusi yang ideal, karena dapat mengetahui persoalan yang dialami oleh kedua belah pihak yang bertikai. Integrasi tersebut menjadi amunisi yang telah berkatalisator untuk mereduksi potensi konflik; Bantuan berupa alat otomotif dan hewan ternak merupakan solusi yang konkrit untuk memberdayakan masyarakat.

Diharapkan kepada Pemerintah Desa Rato untuk tetap berperan dalam menyelesaikan konflik; Pemerintah desa harus memberdayakan masyarakat dengan program program yang jitu untuk mereduksi embrio konflik, segmentasi tetap ada manakala program pemberdayaan dihentikan; Pemerintah desa harus mampu memenuhi kebutuhan perangkat dalam pelaksanaan siskamling, tujuannya yaitu agar lebih dini mendeteksi potensi konflik selain itu juga dapat mencegah adanya pencurian; Kolaborasi harus tetap dipertahankan sebagai konfigurasi untuk menyelesaikan sebuah konflik; Bantuan berupa alat otomotif dan hewan ternak merupakan pemberdayaan yang bersumber dari APBDes dan bantuan lain berupa barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan

REFRENSI

Adi, Isbandi Rukminto, 2002, *Pemikiranupemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Fisher, et. Al (2010), *mengelola konflik, keterampilan dan strategi resolusi konflik berbasis kearifan local*, terjemahan. Global pustaka -tama. Jogjakarta.

Kantor Desa Rato Kecamatan Lambu Kab. Bima Tahun 2019

Nasikun j (2004), *sistem sosial indonesia*. Pt. raja grafindo persada.

Raditya, Ardihe dan A. Sihabul Millah, 2009, *Tafsir Konflik Sosial: Mengurai Ketegangan Sosial Menuju Negeri yang Damai*, Kaukaba, Yogyakarta.

Zubaedi, 2007. Wacana pembangunan alternatif: ragam perspektif pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Jakarta: Ar Ruzz media. Hal. 42

Wirawan, 2010, *Konflik dan Manajemen Konflik, Teori, Aplikasi, dan Penelitian*, Penerbit Salemba Humanika, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999. Tentang *Pemerintah Daerah*

Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah*